



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAZZER ARAFAT
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 767725

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/159 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KERINCI, Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 30.000 m2 di KAB / KOTA KERINCI, Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 S CVT CKD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 374.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.809.506

F. HARTA LAINNYA Rp. 55.000.000

Sub Total Rp. 3.239.309.506

III. HUTANG Rp. 95.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.144.309.506

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.